

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gagasan politik Islam membentuk suatu bagian penting dalam sejarah intelektual manusia secara umum. pemikiran ini terdiri atas sebuah tradisi yang koheren dan berkelanjutan, terpisah dari tradisi Barat dan memiliki logikanya sendiri.<sup>1</sup>

Era kenabian merupakan era pertama dalam sejarah Islam yang dimulai sejak Nabi saw. Dakwah dimulai dengan mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT hingga akhir hayat beliau. Era ini terbagi menjadi dua masa, yang keduanya dipisahkan oleh hijrah. kedua fase itu tidak memiliki perbedaan dan kelainan satu sama lain, seperti yang diklaim oleh beberapa orientalis. Bahkan fase yang pertama merupakan fase yang menjadi titik tolak bagi fase kedua. Pada fase pertama, embrio masyarakat Islam mulai tumbuh dan telah ditetapkan kaidah-kaidah pokok Islam secara general. Kemudian pada fase kedua, bangunan masyarakat Islam itu berhasil dibentuk dan kaidah-kaidah yang sebelumnya bersifat general selesai dijabarkan secara mendetail. Syariat Islam disempurnakan dengan mendeklarasikan prinsip-prinsip baru dan dimulailah pengaplikasian serta

---

<sup>1</sup> Antony Black, *The History of Islamic Political Thought; From the Prophet to the Present*, terj. Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006, hlm. 21.

pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut seluruhnya. Sehingga tampillah Islam dalam bentuk sosialnya secara integral dan aktif.<sup>2</sup>

Sejarah dalam pandangan politik lebih terpusat pada fase kedua dibandingkan dengan fase pertama. Karena saat itu jamaah Islam telah menguasai urusannya sendiri dan telah hidup dalam era kebebasan dan independensi. Mereka telah meraih kedaulatannya secara penuh sehingga prinsip-prinsip Islam sudah dapat diletakkan dalam langkah-langkah praktis. Namun ciri utama yang menandai kedua fase tersebut adalah sifatnya sebagai fase pembentukan dan fase permulaan.<sup>3</sup>

Islam sebagai agama menuntun manusia ke jalan yang benar baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat bahkan negara. Islam bukan sekedar ajaran spiritual melainkan juga memberi petunjuk yang fundamental tentang bagaimana hubungan manusia dengan masyarakat bahkan dengan negara. Sehubungan dengan itu, di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. *Pertama*, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Dhiauddin Rais, *al Nadhariyyah al Siyasiyah al Islamiyyah*, terj. Abdul Hayyi al Kattani, dkk., *Teori Politik Islam*, Jaskarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 2-3.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>4</sup> Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1993, hlm. 2.

*Kedua*, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.<sup>5</sup>

Salah satu akibat yang paling parah dirasakan dari kemunduran umat Islam adalah terhentinya perkembangan intelektual umat Islam, sampai munculnya tokoh-tokoh modernis. Namun dalam hal politik, sampai lahirnya tokoh-tokoh modernis yang menyerukan kembali kepada al Qur'an dan Sunnah seperti Muhammad Ibn Abdul Wahab misalnya, belum juga ditemukan pembahasan tentang konsep yang jelas tentang negara berdasarkan Islam.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak luput dari kemunduran itu. Bahkan, menurut Fazlur Rahman puncak kemunduran intelektual terjadi terutama pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena umat Islam lebih terfokus untuk perjuangan melawan penjajahan, atau karena belum adanya kesadaran tentang betapa pentingnya pembangunan intelektual agar Islam mampu diterjemahkan untuk

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10

<sup>6</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1987, him. 42.

mengatasi berbagai persoalan kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, keadilan, dan sosio politik.<sup>7</sup>

Menjelang dicapainya kemerdekaan, umat Islam baik fundamentalis maupun modernis, yang berada dalam BPUPKI berjuang agar Islam dijadikan dasar negara di Indonesia. Perjuangan ini merupakan bentuk kesungguhan dalam menjadikan Islam sebagai fondasi tertulis bagi kehidupan bernegara, yang didalamnya mengandung berbagai agama. Perjuangan nyata umat Islam adalah dengan mengemukakan kata syariat Islam dalam dasar negara. Dari seluruh anggota BPUPKI yang berjumlah 68 orang, ternyata hanya 15 orang saja yang benar-benar mewakili aspirasi politik Islam.<sup>8</sup>

Perdebatan tentang dasar negara melahirkan dua aliran politik, yaitu Islam dan aliran pemisahan antara negara dan agama, yang memiliki dasar pemikiran berbeda. Kelompok Islam berdalih bahwa dari seluruh ayat al-Qur'an, hanya sekitar 600 ratus ayat yang berisi tentang kehidupan akherat. Ini membuktikan bahwa Islam memperhatikan kehidupan dunia, maka Islam mestinya menjadi dasar bagi berdirinya Indonesia. Sementara itu kaum nasionalis berpendapat bahwa Indonesia memiliki khas yang istimewa, maka gagasan negara Islam harus ditolak.<sup>9</sup>

Disebutkan oleh Bachtiar Effendy bahwa Islam adalah sebuah agama yang multi interpretatif, maka Islam dapat berjalan seiring dengan politik modern,

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>8</sup> Heni Wahyu Widayati, Dialog Pemikiran tentang Islam dan Negara di Indonesia Masa Awal Kemerdekaan, Jurnal Dakwah, Vol. X No. 2, Juli-Desember, 2009, hlm. 215.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

dan bisa pula sebaliknya, tergantung dari jenis Islam manakah yang diajukan untuk dianalisis.<sup>10</sup>

Dalam al Qur'an tidak ditemukan ayat yang dengan tegas membicarakan soal pembentukan negara dan sistem pemerintahan yang harus berlaku dalam Islam. Yang penting adalah dilaksanakannya ajaran Islam dalam masyarakat, "Harun Nasution".<sup>11</sup>

Ditambahkan oleh M. Amin Rais, beliau mengatakan bahwa dalam al Qur'an dan Sunnah tidak ada perintah yang menyatakan untuk mendirikan negara Islam.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan keabadian wahyu yang di dalamnya memuat etika dasar, serta norma-norma kemudian menyerahkan hal detail pada akal manusia dengan jalan *ijtihad*.

Keyakinan Cak Nur terhadap prinsip-prinsip universal dalam al Qur'an adalah puncak spiritual dalam mencari solusi atas ketimpangan Islam dan keadilan serta krisis kemanusiaan (*human crisis*). Ia menggunakan istilah tauhid terhadap tema-tema yang dirujuk dari al Qur'an seperti ibadah, zakat, dzikir atau Islam, iman dan ihsan sebagai metode pendekatan diri terhadap Tuhan. Prinsip ini akan memberikan dua implikasi. *Pertama*, memperkokoh kesadaran batin manusia, menumbuhkan spiritualitas yang mendalam dan juga menjadi basis etika pribadi. *Kedua*, penekanan

---

<sup>10</sup> Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, hlm. 16.

<sup>11</sup> Harun Nasution, *Hubungan Islam dan Negara*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag RI, 1992, hlm. 222.

<sup>12</sup> M. Amin Rais, *Cakrawala Islam: antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1989, hlm. 41.

kepada kesatuan universal umat manusia sebagai umat yang satu, berdasarkan persamaan, keadilan, kasih sayang, toleransi dan kesabaran.<sup>13</sup>

Cak Nur menyatakan bahwa munculnya gagasan politik Islam atau Islam sebagai dasar politik karena bentuk kecenderungan apologetis. Apologi ini, tumbuh dari dua jalur. *Pertama*, apologi karena ideologi Barat, seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. *Kedua*, karena legalisme yaitu apresiasi serba legalistik kepada Islam. Dalam persepsi legalistik, Islam itu dipandang semata-mata sebagai struktur dan kumpulan hukum. Kecenderungan legalisme ini bagi Cak Nur, tidak lain berakar dari fiqihisme. Padahal pandangan yang muncul dari kodifikasi hukum hasil pemikiran sarjana Islam pada abad-abad kedua dan ketiga hijriah, bukan mustahil akan menyebabkan fiqih kehilangan relevansinya dengan pola kehidupan masyarakat mutakhir yang terus berubah dan berkembang dalam berbagai dimensinya.<sup>14</sup>

Dengan demikian, secara prinsipil, konsep politik Islam, menurut keyakinan Cak Nur, adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara politik dan agama. Politik adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama, menurutnya adalah aspek kehidupan lain, yang dimensinya spiritual dan pribadi. Karena itu tidak heran kalau Cak Nur tidak setuju jika Islam dipandang sebagai ideologi. Baginya Islam bukanlah sebuah ideologi. Sebab pandangan langsung kepada Islam

---

<sup>13</sup> Ahmad A. Sofyan & M. Roychan Madjid, *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003, hlm. 67.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

sebagai ideologi, dapat berarti merendahkan agama itu menjadi setaraf dengan berbagai ideologi yang ada di dunia.<sup>15</sup>

Cak Nur menambahkan pernyataannya bahwa:

*“...Agama kita mengajarkan bahwa formalitas ritual belaka tidaklah cukup sebagai wujud keagamaan yang benar. Karena itu juga tidak pula segi-segi lahiriah itu akan menghantarkan kita menuju kebahagiaan, sebelum kita mengisinya dengan hal-hal yang lebih esensial. Justru sikap membatasi diri hanya kepada hal-hal ritualistik dan formal akan sama dengan peniadaan tujuan agama yang hakiki.”*

Pernyataan tersebut diatas sesuai dengan spektrum teoritik lainnya yang melihat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori politik

atau sistem praktik yang harus diselenggarakan oleh umatnya, dan bahwa al Qur'an berhubung bukan sebagai kitab politik sama sekali tidak menyediakan

istilah negara (*dawlah*) ataupun istilah-istilah teknis politik lainnya, kecuali nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis tentang keadilan, egalitarianisme, persaudaraan, dan kebebasan yang justru bersifat universal, yang akhirnya sepanjang suatu negara tetap berpegang dan menyelenggarakan prinsip-prinsip universal itu, maka baik sistem maupun mekanisme yang dijalankan adalah benar menurut Islam.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tulisan ini akan membahas permasalahan politik Islam dengan fokus pada gagasan Cak Nur tentang politik Islam di Indonesia yang kemudian penulis kemas dalam skripsi dengan

judul **“Analisis Gagasan Cak Nur tentang Politik Islam di Indonesia”**.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet ke II, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995, hlm. 454.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gagasan Cak Nur tentang politik Islam di Indonesia?
2. Apa dasar-dasar gagasan Cak Nur tentang politik Islam di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui gagasan Cak Nur tentang politik Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dasar-dasar gagasan Cak Nur tentang politik Islam di Indonesia.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelusuran penulis, dijumpai adanya beberapa skripsi yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Handy Setiyo Nugroho (2199153) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Hubungan Agama dan Negara dalam Islam (Studi Terhadap Pemikiran M. Din Syamsuddin)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut M. Din Syamsuddin relasi agama-negara hendaknya saling menguntungkan dan mendukung, seperti di Indonesia. Program dan kebijakan negara tentunya sangat memerlukan keterlibatan agama, dan sebaliknya dengan adanya negara maka agama akan mudah berkembang. Din menganggap bahwa negara Indonesia secara substantif adalah negara Islami. Alasannya, dalam Pancasila terkandung substansi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti tauhid, kemanusiaan, persaudaraan, demokrasi, dan keadilan, dan agama menempati rating tinggi. Agama juga mendapat pengakuan instrumental dan menjadi landasan spiritual, etika dan moral bagi pembangunan. Pandangan Din tersebut dapat dikelompokkan pada kecenderungan simbioistik-mutualistik, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan antara agama-negara.. Gagasan simbioistik-mutualistik dapat menjadi jalan tengah antara kecenderungan integralistik vis a vis sekularistik. Pendekatan yang digunakan dalam relasi simbioistik-mutualistik ini adalah substantivistik, yaitu pendekatan yang menekankan isi daripada bentuk dengan memusatkan perhatian pada bagaimana mengisi negara dengan etika dan moralitas agama menjadi ruh pembangunan. Namun demikian, kelemahan dari hubungan simbioistik-mutualistik adalah sering terjadi kendala dalam mengaktualisasikan agama dalam proses perubahan sosial. Penekanan

Lambang-lambang keagamaan dalam kehidupan hanya akan menampilkan politisasi agama dan menguatkan solidaritas keagamaan yang sangat terbatas, yang pada gilirannya agama akan kehilangan fungsinya sebagai pengatur segala aspek kehidupan. Beberapa prinsip moralitas Islam seperti pemerataan ekonomi, keadilan juga jauh menjelma dalam kenyataan.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Midia Tulus Lusiyana (1198109) Fakultas Da'wah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Etika Politik dalam Buku Fatsoen Ditinjau dari Perspektif Dakwah*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Etika Politik dalam buku Fatsoen bila dikaitkan dengan dakwah Islam akan bersesuaian. Dengan pesan-pesan etika politiknya Nurcholis Madjid telah melaksanakan tugasnya sebagai subyek dakwah (da'i) yaitu hubungan masyarakat yang berperan sebagai konsultan agama, dalam rangka ikut serta memecahkan problema kehidupan masyarakat yang multi kompleks. Adapun metode dakwahnya Nurcholis Madjid menggunakan metode pengajaran dan pendidikan. Karena pesan dalam Buku Fatsoen intinya adalah pengajaran kepada pembacanya tentang Etika dalam hidup. Bila ditinjau dari bentuk komunikasi buku Fatsoen pada tabloid Tekad termasuk dalam bentuk komunikasi massa dimana pesan komunikasi yang ditampilkan Nurcholis Madjid menggunakan media pers. Dalam berkomunikasi, bahasa memegang peran penting. Banyak kesalahan informasi dan kesalahan interpretasi disebabkan oleh bahasa. Sedangkan bahasa sendiri terdiri dari kata atau

kalimat yang mengandung pengertian denotatif dan pengertian konotatif. Dalam melancarkan komunikasi, kita harus berupaya menghindari pengucapan kata-kata yang mengandung pengertian konotatif. Jika melihat tulisan-tulisan Nurcholis Madjid dalam buku *Fatsoen* dapat diketahui bahwa Nurcholish Madjid menggunakan bahasa yang denotatif. Dari sini dapat disimpulkan dari segi efektifitas berkomunikasi bahwa tulisan dalam buku *Fatsoen* efektif.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ulil Amri (2101258) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Hubungan Islam dan Negara (Studi Analisis terhadap Pemikiran Politik Mohammad Natsir)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Mohammad Natsir tentang Nash al Qur'an dan Sunnah serta Ijma' menjadi dasar pemikirannya. Lapangan ijtihad memungkinkan masyarakat Islam dapat merumuskan cita-cita dan program sosial politik mereka dengan memperhatikan keadaan lingkungan dan kebutuhankebutuhan mereka sendiri. Sebagai landasan, jelas agama (Metode Syura dalam Nash al Qur'an dan Sunnah) dengan sifat ketauhidannya akan secara otomatis menyediakan jalur (track) yang harus dilalui oleh negara, sekaligus "mengingatkannya" ketika negara keluar dari track tersebut. Jalur yang dimaksud disini terkait dua hal. Pertama; pembangunan kesadaran mental bagi setiap individu, yang pada akhirnya akan berubah menjadi kesadaran mental kolektif. Kedua; terdapat beberapa tata aturan tertentu yang tidak diperbolehkan untuk merubahnya. Dengan metode inilah Muhammad Natsir menghasilkan pemikiran-pemikiran

tentang kehidupan khususnya dalam wacana politik Islam. Sosio-kultur sangat mempengaruhi terhadap konsep pemikiran hubungan Agama dan Negara yang dikembangkan oleh Natsir. Pemikirannya memiliki relevansi dengan “paradigma simbiotik”, yang memandang hubungan Agama dan Negara sebagai reciprocal relation. Paradigma ini telah menawarkan formalisasi Islam. Namun di dalamnya terdapat nilai-nilai demokratis. Meskipun Syari’at agama harus ditegakkan dalam sebuah negara, tetapi tidak membatasi secara mutlak kepada masyarakat muslim untuk ikut andil dalam menentukan kondisi sosial politik negara.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Hamsah Hasan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Sulawesi Selatan tahun 2015 dengan tema “*Hubungan Islam dan Negara; Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia*”. penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan kembali isu tentang hubungan Islam dan negara dalam perspektif politik Islam di Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengkritisi perkembangan serta pasang-surut hubungan Islam dan negara yang sangat dinamis mewarnai peta perpolitikan di Indonesia yang kental dengan tradisi Islam. Pembahasan ini menyimpulkan bahwa: Pemahaman terhadap hubungan agama dan negara dengan pendekatan politik Islam tidak dimaksudkan untuk mendirikan negara agama atau negara Islam Indonesia, tetapi lebih pada pengisian ruang-ruang agama secara fungsional dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hubungan Islam dan negara dapat terintegrasi dalam sebuah relasi fungsional yang sama-sama

mencita-citakan keluhuran. Baik relasi integralistik, simbiosis maupun sekularistik, masing-masing harus dipandang sebagai bentuk yang saling melengkapi. Menghadapi perkembangan modernitas, hubungan Islam dan negara harus diartikulasikan sebagai upaya untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dari berbagai aspeknya, seperti: globalisasi ekonomi-politik dunia, sains dan teknologi, perkembangan isu-isu demokrasi, gender, HAM, pluralisme, secara nasional maupun internasional.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena apa yang penulis teliti adalah pemikiran politik Islam Nurcholis Madjid. Oleh karena itu, penulis yakin untuk tetap melanjutkan penelitian ini tanpa ada asumsi plagiasi.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan politik Islam. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan

memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

### a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.<sup>18</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Cak Nur yang membahas tentang politik, seperti *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* karya Cak Nur.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>19</sup>

Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan pemikiran politik Islam, seperti *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam* karya Ahmad A. Sofyan

& M. Roychan Madjid, *Demokrasi Religius; Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais* karya Idris Thaha, *Zaman Baru*

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 3.

<sup>18</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. ke-1, 2004, hlm. 57.

<sup>19</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006, hlm. 30.

*Islam Indonesia; Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid dan Jalaluddin Rakmat* karya Dedy Djamaluddin Malik dan Jalaluddin Rakhmat, *Teori Politik Islam* karya Dr. Dhiauddin Rais, dan lain-lain.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>20</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen atau penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

### **4. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan pemikiran politik Islam. Metode ini digunakan untuk memahami pemikiran dan konsep dasar yang dipakai oleh Cak Nur tentang politik Islam. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pemikiran maupun konsep dasar yang dipakai oleh Cak Nur.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988, hlm. 211.

Bab I pendahuluan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan umum tentang politik Islam pengertian politik Islam, dasar-dasar politik Islam, tujuan politik islam, relasi agama dan negara.

Bab III gagasan Cak Nur tentang politik Islam biografi Nurcholis Madjid, pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik Islam, dasar-dasar gagasan Cak Nur tentang politik Islam.

Bab IV analisis gagasan Cak Nur tentang politik Islam, dan analisis dasar-dasar gagasan Cak Nur tentang politik Islam.

Bab V penutup, kesimpulan, saran-saran dan penutup.